

Nomor : B1.018 / LPTK-PS / UMSS-001 / 01 / 2024
Lampiran : 1 (satu) set

31 Januari 2024

Kepada Yth

Ketua DPD Perbarindo dan Majalah Media BPR
di

Tempat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Periode Tahun 2023

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ptoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola bagi BPR. (Terlampir)

Demikian kami sampaikan agar maklum.

PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel



Kevin
Direktur Operasional

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666531-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602679-30012024164258

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprutomo.kaops@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 16:42:58



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



Utomobank

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	3
BAB I PENJELASAN UMUM	4
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	8
B. Kepemilikan Saham Direksi	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	9
C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	10
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	10
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	11
E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR	12
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	12
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	12
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	12
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	12
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	13
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	13
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	14
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	14
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	15
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	15
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	16
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	16
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	16
BAB III LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>)	21

**LEMBAR PERSETUJUAN
DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini Kami menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel Tahun 2023

Telah disusun dan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 11 / SEOJK.03/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 18 Juli 2022
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016
5. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baturaja, 29 Januari 2024

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Menyetujui


Lunto Hasan
Komisaris Utama




Ferrial Aksha
Direktur Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (yang selanjutnya disebut Utomo Bank) selalu senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*). Utomo Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan serta didukung oleh komitmen yang kuat dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran organisasi BPR sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Utomo Bank serta berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Utomo Bank berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku terkait Pelaksanaan Tata Kelola BPR. Sebagai bentuk Perwujudan Pelaksanaan Peraturan diatas maka Utomo Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola BPR.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Ferrial Aksha
	NIK	: -
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none">a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.e. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Satuan atau Unit Kerja yang menangani Pembukuan, Operasional, dan Kegiatan Penunjang Operasional serta Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Audit Intern, dan Independen terhadap Unit Kerja Lain.f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
2.	Nama	: Muhammad Imron
	NIK	: -
	Jabatan	: Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none">a. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang- undangan dan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.c. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, APU-PPT dan Sumber Daya Manusia.d. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.f. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.	

	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.	
3.	Nama	: Kevin
	NIK	: -
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. c. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. d. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. 	
Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat, Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : c. Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi Utomo Bank. d. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sesuai batas jangka waktu yang diberikan, Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sanksi terhadap unit kerja atas temuan berulang serta sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. 	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Lunto Hasan
	NIK	: -
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. c. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. d. Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengurusan serta pelaksanaan kebijakan strategis bank oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 	

	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPR. f. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis BPR, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar. g. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR. h. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) pada BPR. 	
2.	Nama	: Setiawan Ngadi
	NIK	: -
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Komisaris Utama dalam menjalankan tugasnya. b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. d. Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengurusan serta pelaksanaan kebijakan strategis bank oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPR. f. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis BPR, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar. g. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR. h. Mengikuti rapat Dewan Komisaris. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) pada BPR. 	
Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat, Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang 	

<p>melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi Utomo Bank.</p> <p>c. Menggiatkan pengkinian data nasabah guna mendukung penerapan APU, PPT dan PPPSPM.</p> <p>d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas sesuai batas waktu yang diberikan termasuk menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan melakukan <i>dual control</i> agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan dan memberikan sanksi kepada unit kerja atas temuan yang berulang.</p> <p>e. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.</p> <p>f. Direksi agar tetap menjaga likuiditas bank serta memastikan rasio-rasio keuangan bank tetap terjaga diatas ketentuan regulator.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
-

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite :	
Utomo Bank Belum memiliki Anggota Komite.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Peamantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite :						
Utomo Bank Belum memiliki Anggota Komite.						

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Utomo Bank Belum memiliki Anggota Komite.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1.	Ferrial Aksha	-	Rp0,00	0%
2.	Muhammad Imron	-	Rp0,00	0%
3.	Kevin	-	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Utomo Bank.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	NIK	Sandi bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ferrial Aksha	-	-	-	0%
2.	Muhammad Imron	-	-	-	0%
3.	Kevin	-	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Perusahaan Lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ferrial Aksha	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Muhammad Imron	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Kevin	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi Utomo Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham Pengendali.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ferrial Aksha	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Muhammad Imron	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Kevin	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi Utomo Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Berdasarkan Akta Pendirian dan perubahan terakhir kali dengan akta notaris No. 11 tertanggal 27 Maret 2023, maka kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Lunto Hasan	-	Rp3.500.000.000,00	17.5%
2.	Setiawan Ngadi	-	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Salah satu Anggota Dewan Komisaris Utomo Bank memiliki saham sebesar 17,5% dengan Nominal Rp 3.500.000.000 pada Utomo Bank.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Lunto Hasan	-	602582	PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung	7.26%
			-	PT. Aneka Adi Sarana	40.00%
			-	PT. Utomo Sejahtera Bersama	25.00%
			-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago	22.50%
			-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk	25.00%
			-	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Kertaraharja	25.35%
			-	PT. Jaga Sakti	25.00%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Salah Satu Anggota Dewan Komisaris Utomo Bank memiliki Saham pada perusahaan lain yaitu PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebesar 7,26%, PT. Aneka Adi Sarana sebesar 40,00%, PT. Utomo Sejahtera Bersama sebesar 25,00%, PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago sebesar 22,50%, PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk sebesar 25.00% dan PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Kertaraharja sebesar 25,35% dan PT. Jaga Sakti sebesar 25,00%.

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Lunto Hasan	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Setiawan Ngadi	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris Utomo Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Lunto Hasan	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Setiawan Ngadi	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau Anggota Direksi Bank dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Bank.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp651.525.000,00	2	Rp333.962.500,00
2.	Tunjangan	3	Rp733.814.114,00	2	Rp179.632.426,00
3.	Tantiem	3	Rp102.109.220,00	2	Rp43.761.094,00

4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp364.671.617,00	2	Rp86.349.347,00
Total			Rp1.852.119.951,00		Rp643.705.367,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Total Remunerasi Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan RUPS Bagi Dewan Direksi berjumlah Rp 1. 852.119.951,00 dan bagi Dewan Komisaris berjumlah Rp 643.705.367,00					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Sewa Rumah (2)	Sewa Rumah (1)
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Mobil Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (3)	Asuransi Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.82 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.37 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.31 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.04 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.24 : 1
Penjelasan lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Gaji Pegawai Terendah sebesar 4,82: 1, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah sebesar 1,37 : 1 , Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah sebesar 1,31 : 1, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi sebesar 2,04 : 1, dan Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi sebesar 3,24 : 1.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama Tahun 2023 Dewan Komisaris menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1.	21 Maret 2023	2	a. Realisasi RBB BPR s.d periode 28 Februari 2023 b. Evaluasi Pengawasan Penerapan Program APU PPT Periode Januari dan Februari 2023 c. Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun buku 2022 beserta Rekomendasi Penunjukan KAP.
2.	23 Juni 2023	2	a. Realisasi RBB BPR s.d periode 31 Mei 2023 b. Evaluasi Pengawasan Penerapan Program APU PPT Periode Maret 2023 – Mei 2023 c. Perkembangan Penyaluran Kredit Channeling dan Kreidit Sindikasi.
3.	10 September 2023	2	a. Realisasi RBB BPR s.d periode 31 Agustus 2023 b. Evaluasi Pengawasan Penerapan Program APU PPT Periode Juli 2023 dan Agustus 2023 c. Perkembangan kerjasama Kredit Channeling, Kredit Sindikasi dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan Fintek Komunal.
4.	10 November 2023	2	a. Realisasi RBB BPR s.d periode 31 Oktober 2023. b. Evaluasi Pengawasan Penerapan Program APU PPT Periode September - Oktober 2023. c. Perkembangan Kerjasama penyaluran kredit channeling, Kredit Sindikasi dan Kerjasama Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan Fintek Komunal. d. Hasil Pemeriksaan OJK Periode Oktober 2022 – September 2023 dan Penetapan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024.

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 4 (empat) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi jumlah

minimal peserta rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika selama rapat.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Lunto Hasan	1871060111570004	1	3	100 %
2.	Setiawan Ngadi	1872032709720002	1	3	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam Upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2023 telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal * (Dalam 1tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama periode Tahun 2023 Tidak ada Penyimpangan Intern (Internal Fraud) yang dapat diartikan sebagai penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Utomo Bank.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :		
Selama periode Tahun 2023 Tidak terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi Utomo Bank.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Selama Tahun 2023 Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan di Utomo bank.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	2 Januari 2023	Sosial	Sponsorship HUT Ogan Ilir	Diknas OI	Rp 2,170,000
2.	3 Januari 2023	Sosial	Partisipasi HUT OKUS	Pemkab OKUS	Rp 300,000
3.	4 Januari 2023	Sosial	Partisipasi HUT OI	Diknas OI	Rp250,000
4.	5 Januari 2023	Sosial	Cetak Spanduk HUT OI	Diknas OI	Rp150,000
5.	10 Januari 2023	Sosial	Bantuan Acara Gebyar Islami Kel. Air Gading	Kelurahan Air Gading	Rp250,000
6.	10 Januari 2023	Sosial	Sponsorship kegiatan Expo Balitbang OI	Balitbang OI	Rp500,000
7.	18 Januari 2023	Sosial	Sponsorship pelantikan IPEMI OKU	IPEMI OKU	Rp 250,000
8.	18 Januari 2023	Sosial	Sponsorship HUT OKUT	Dinkop OKUT	Rp 1,975,000
9.	20 Januari 2023	Sosial	Partisipasi HUT OKUT	Pemkab OKUT	Rp 350,000
10.	25 Januari 2023	Sosial	Sponsorship kegiatan Pengajian Akbar	Sekda OI	Rp300,000
11.	31 Januari 2023	Sosial	Sponsorship Lomba Tenis Meja	HRM Yusuf Usman	Rp 1,000,000
12.	8 Februari 2023	Sosial	Sponsorship PERWOSI OKU	Supiyati Ginting	Rp500,000
13.	10 Februari 2023	Sosial	Bantuan Rompi Panitia Kemenag OKI	Kemenag OKI	Rp1,500,000

14.	14 Februari 2023	Sosial	Sponsorship Turnamen Tenis Meja	Ir. Wilson	Rp250,000
15.	23 Februari 2023	Sosial	Sponsorship UMKM & Bakti Sosial KORMI	Kormi Sumsel	Rp500,000
16.	27 Februari 2023	Sosial	Sponsorship Lomba DANDIM OKU	Indra Oji	Rp500,000
17.	10 Maret 2023	Sosial	Pembelian Hewan Qurban Kantor Cabang MPA	Masjid Jami' Nurul Desa Banumas	Rp2,600,000
18.	16 Maret 2023	Sosial	Sumbangan Ruahan Perum TPI	Ketua RT	Rp50,000
19.	10 April 2023	Sosial	Sponsorship Jelajah Alam Kartar OKUS	Karang Taruna OKUS	Rp250,000
20.	10 April 2023	Sosial	Santunan Ke Panti Asuhan	Panti Asuhan Ats-Tsaniyah	Rp3,000,000
21.	12 April 2023	Sosial	Sponsorship Penyaluran Bakat Kelurahan Air Gading	Karang Taruna Air Gading	Rp250,000
22.	18 April 2023	Sosial	Sponsorship Idul Fitri untuk POLRES OKU	Polsek OKU	Rp1,000,000
23.	18 April 2023	Sosial	Sponsorship Alat Rebana Masjid Darussalam	Hosnil Hotimah	Rp500,000
24.	5 Mei 2023	Sosial	Sponsorship Peresmian Budhis Center	Tony Gozali	Rp500,000
25.	5 Mei 2023	Sosial	Sponsorship Hardiknas OKUT	Diknas OKUT	Rp1,600,000
26.	5 Mei 2023	Sosial	Sponsorship acara sebiduk sehaluan	Diknas OKUT	Rp1,680,000
27.	10 Mei 2023	Sosial	Partisipasi Ucapan Duka Kepala BPS OKU	BPS OKU	Rp300,000
28.	12 Mei 2023	Sosial	Karangan Bunga Duka Kadin OI	Diknas OI	Rp250,000
29.	19 Mei 2023	Sosial	Partisipasi WTP Pemkab OKU	Pemkab OKU	Rp250,000
30.	22 Mei 2023	Sosial	Sponsorship Pengembangan <i>Line Dance</i> oleh Inorga ILDI (Ikatan Langkah Danda Indonesia)	Panita ILDI	Rp500,000
31.	25 Mei 2023	Sosial	Sponsorship Kegiatan Senam Bersama	Bambang Rusadi	Rp500,000
32.	15 Juni 2023	Sosial	Pembelian Hewan Qurban Kantor Kas Muaradua	Masjid At Taqwa Bumi jaya	Rp3,650,000
33.	16 Juni 2023	Sosial	Pembelian 10 Sak Semen untuk Polsek OKU	Polsek OKU	Rp1,500,000

34.	21 Juni 2023	Sosial	Sponsorship Bakti Sosial Kartar Air Gading	Karang Taruna Air Gading	Rp250,000
35.	21 Juni 2023	Sosial	Pembelian Hewan Qurban Kantor Cabang OI	Masjid Nurul Iman Desa Talang Aur	Rp2,800,000
36.	23 Juni 2023	Sosial	Partisipasi HUT Bhayangkara OKU	Polres OKU	Rp500,000
37.	23 Juni 2023	Sosial	Pembuatan Umbul-umbul FBKK Diknas OKU	Diknas OKU	Rp275,000
38.	23 Juni 2023	Sosial	Pembuatan Banner FBKK Diknas OKU	Diknas OKU	Rp400,000
39.	26 Juni 2023	Sosial	Papan Bunga Perpanjangan Bupati OKU	Pemkab OKU	Rp250,000
40.	27 Juni 2023	Sosial	Pembelian Hewan Qurban Kantor Pusat	Langgar Ogan	Rp23,500,000
41.	12 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Pelantikan SEKDA OKU	Sekda OKU	Rp250,000
42.	12 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Ultah BNI	BNI Baturaja	Rp250,000
43.	14 Juli 2023	Sosial	Sponsorship Raimuna Nasional XII – Gerakan Pramuka Cabang Okus	Sholehien Abuasir	Rp500,000
44.	20 Juli 2023	Sosial	Sponsorship HUT OKU DIKNAS OKU	Diknas OKU	Rp1,500,000
45.	24 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Pelantikan Kadinkes OKU	Dinkes OKU	Rp500,000
46.	24 Juli 2023	Sosial	Pembelian Bendera 150 lembar untuk Diknas OKUS	Diknas OKUS	Rp2,250,000
47.	25 Juli 2023	Sosial	Sponsorship HUT RI Diknas OKUS	Diknas OKUS	Rp2,500,000
48.	26 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Pelantikan P3K di OI	Diknas OI	Rp250,000
49.	27 Juli 2023	Sosial	Pembuatan Kalender Markas Komando	Herdi	Rp150,000
50.	27 Juli 2023	Sosial	Sponsorship HUT RI Kelurahan Saung Naga	Kel. Saung Naga	Rp500,000
51.	28 Juli 2023	Sosial	Sponsorship Pemasangan Tiang Lampu Hias untuk HUT RI Di Kel. Binjai Bumi Agung – Muaradua	Kel. Binjai Bumi Agung	Rp100,000
52.	31 Juli 2023	Sosial	Partisipasi HUT OKU	Pemkab OKU	Rp250,000
53.	31 Juli 2023	Sosial	Pembelian Bendera 250 lembar untuk SETDA OKU	SETDA OKU	Rp3,375,000

54.	1 Agustus 2023	Sosial	Sponsorship Turnamen Badminton HUT RI	Nico Surya Daya	Rp500,000
55.	7 Agustus 2023	Sosial	Sponsorship HUT RI Kelurahan Kisau – Muaradua	Kelurahan Kisau	Rp100,000
56.	7 Agustus 2023	Sosial	Sponsorship HUT RI Kelurahan Binjai Bumi Agung – Muaradua	Kel. Binjai Bumi Agung	Rp200,000
57.	9 Agustus 2023	Sosial	Pembelian Kulkas untuk Diknas OKU	Diknas OKU	Rp1,550,000
58.	11 Agustus 2023	Sosial	Sponsorship Lomba HUT RI Diknas OI	Diknas OI	Rp1,900,000
59.	14 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi HUT RSIA Prima Qonita	RS Prima Qonita	Rp250,000
60.	14 Agustus 2023	Sosial	Sponsorship Lomba HUT RI Diknas OKU	Diknas OKU	Rp1,000,000
61.	14 Agustus 2023	Sosial	Sponsorship Pelantikan P3K Diknas OKU	Diknas OKU	Rp1,000,000
62.	15 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi HUT RI Persatuan Tenis Meja Pasar Lama	Kelurahan Pasar Lama	Rp250,000
63.	16 Agustus 2023	Sosial	Biaya APK beraksi Dinkes OKUT	Dinkes OKUT	Rp2,500,000
64.	23 Agustus 2023	Sosial	Bantuan bencana Kebakaran Wilayah Keluran Pasar Baru	Keluran Pasar Baru	Rp1,605,000
65.	28 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi HUT Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Rp250,000
66.	29 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi HUT Bank Mega	Bank Mega	Rp250,000
67.	29 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Launching Umroh di OI	Abu Hurairah	Rp500,000
68.	19 September 2023	Sosial	Sponsorship Kegiatan IGONAS	Diknas OKUT	Rp2,000,000
69.	4 Oktober 2023	Sosial	Sponsorship lomba Drumband di OKU	Diknas OKU	Rp1,000,000
70.	6 November 2023	Sosial	Sponsorship lomba Bupati CUP	Zairi	Rp500,000
71.	7 November 2023	Sosial	Sponsorship Lomba Karang Taruna Muaradua	Febriyadi	Rp250,000
72.	8 November 2023	Sosial	Sponsorship Festival Sepak Bola OKU	Aldino Setia Putra	Rp300,000
73.	16 November 2023	Sosial	Partisipasi Akreditasi Puskesmas Pengaringan	Puskesmas Pengaringan	300,000
74.	16 November 2023	Sosial	Sponsorship Turnamen Futsal Gastar	Gastar Club	Rp250,000

75.	17 November 2023	Sosial	Sponsorship HUT PGRI	Diknas OKU	Rp1,400,000
76.	23 November 2023	Sosial	Bantuan kegiatan HUT KORPRI di OI	Sekda OI	Rp640,000
77.	30 November 2023	Sosial	Bantuan kegiatan HUT SEKDA YJI	Sekda OI	Rp645,000
78.	7 Desember 2023	Sosial	Partisipasi Akreditasi Puskesmas Ulak Pandan	Puskesmas Ulak Pandan	Rp350,000
79.	11 Desember 2023	Sosial	Partisipasi HUT BPR Agritrans	BPR Agritrans	Rp250,000
80.	12 Desember 2023	Sosial	Sponsorship Hari Kesehatan Nasional	Dinkes OKU	Rp1,500,000
81.	13 Desember 2023	Sosial	Partisipasi HUT BPR Puskopad	BPR Puskopad	Rp175,000
82.	15 Desember 2023	Sosial	Bantuan untuk Masjid Baitun Nur	Masjid Baitun Nur	Rp2,000,000
83.	21 Desember 2023	Sosial	Sponsorship Kegiatan Hari Amal Bakti	Kemenag OKU	Rp1,180,000
84.	21 Desember 2023	Sosial	Sponsorship Kegiatan Jalan Sehat Dispora OKU	Dispora OKU	Rp1,250,000
85.	27 Desember 2023	Sosial	Partisipasi Hari Kesehatan Nasional	Dinkes OKU	Rp250,000
86.	27 Desember 2023	Sosial	Pembelian Air Mineral Untuk Posko Nataru di Muaradua	Polres OKUS	Rp60,000
87.	28 Desember 2023	Sosial	Partisipasi Kapolsek Martapura	Polres OKUT	Rp300,000
88.	29 Desember 2023	Sosial	Pembuatan Baju untuk Sekda OI	Sekda OI	Rp2,630,000
Penjelasan Lebih Lanjut pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik					
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial sebesar Rp 98.560.000,00					

BAB III
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel
 Alamat : Jalan Pahlawan Kemarung No. 369, Baturaja, Ogan
 Komering Ulu, Sumatera
 Selatan
 Nomor Telepon : 0735-323332
 Posisi Laporan : Desember 2023
 Modal Inti : Rp 47.867.534.537
 Total Aset : Rp 342.610.236.114

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.82 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut

No	Faktor yang dinilai	Bobot Faktor	Nilai (S+P+H)	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	1.33	0.266
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00%	1.46	0.218
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	2.07	0.207
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.83	0.183
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	2.23	0.223
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	1.20	0.090
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.25	0.169
	Nilai Komposit	100.00%		1.82
	Peringkat Komposit		2	

B. RINGKASAN PERHITUNGAN PENILAIAN SENDIRI

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai : 1.33)

Kecukupan Jumlah dan Komposisi Direksi telah disesuaikan dengan ukuran dan Perkembangan Kompleksitas Kegiatan Usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk Direksi BPR, Telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan pemahaman atas prinsip- prinsip kehati- hatian dan tercermin dari baiknya pencapaian sebagian besar dari target Rencana Bisnis BPR Pada Tahun 2023, mampu mengambil keputusan secara Profesional dan Independen, menindaklanjuti temuan dari Audit Intern, Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau Otoritas lainnya dan sebagaimana prinsip- prinsip Penerapan Tata Kelola BPR dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai : 1.46)

Utomo Bank memiliki 2 (dua) Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Dalam Penerapan Tata Kelola BPR, Dewan Komisaris melakukan tugas Pengawasan dengan Mengarahkan, Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Strategis BPR untuk melindungi kepentingan *Stakeholders* termasuk didalamnya memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil Pengawasan Otoritas Lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk melakukan perbaikan dan menyampaikan Dokumen hasil tindak lanjut temuan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai : 0)

Utomo Bank belum memiliki Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai : 3)

Bahwa dalam Kepengurusan Utomo Bank, para Pengurus dan Pemegang Saham tidak mempunyai suatu Hubungan Keuangan, Kepemilikan Saham dan/ atau Hubungan Keluarga Sesama pengurus dan/ atau Pemegang Saham, hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan Pengelolaan BPR secara Profesional, Independensi dan Bebas dari Intervensi para Pihak, dan dituangkan dalam Kebijakan yang terpisah dalam Fungsi dan Wewenang Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Penetapan Standar Baku dalam Perlakuan Pemberian Kebijakan Penyaluran Dana dan Penghimpunan Dana terhadap Pihak Terkait dengan Utomo Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai : 2.07)

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan BPR Utomo telah diterapkan secara Efektif dan Independen oleh Direktur Kepatuhan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja atau Fungsi Operasional. Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Manajemen Risiko didukung Komitmen yang tinggi dari Unit Kerja yang berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola BPR dan memastikan Kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sudah diimplementasikan di seluruh Aktifitas Operasional BPR, serta melakukan Review dan Kajian mengenai Kepatuhan dari Unit- Unit Kerja Operasional terhadap Ketentuan Internal dan Eksternal yang berlaku guna memastikan bahwa pengelolaan usaha BPR telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Perundang- undangan yang berlaku. Pedoman, Sistem dan Prosedur Internal disesuaikan dengan Perkembangan dan Kompleksitas Usaha BPR.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai : 1.83)

Utomo bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bertujuan untuk memastikan semua Unit Kerja dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku di Utomo bank dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. BPR melaksanakan Peningkatan Mutu Keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan

berkelanjutan terkait dengan Penerapan Fungsi Audit Intern dengan Pelatihan terkait Bidang Audit Intern Bank.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai : 1)

Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan, Utomo bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Pelaksanaan Audit Ekstern dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau sesuai dengan Persyaratan Minimum yang ditetapkan dalam Ketentuan dengan Kualitas dan Cakupan Hasil Audit Akuntan Publik yang menggambarkan Kondisi BPR berdasarkan Parameter Penilaian yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai : 2.23)

Utomo Bank telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, Utomo bank memiliki kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. BPR menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh Risiko yang diwajibkan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi telah melakukan Pengembangan Budaya Manajemen Risiko pada Seluruh Jenjang Organisasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia antara lain melalui Pelatihan dan/ atau Sosialisasi mengenai Manajemen Risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai : 1.90)

Utomo bank telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur Tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait, Debitur Grup dan/atau Debitur Besar sebagai bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR. Pada Tahun 2023 Tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK pada Utomo bank dan Utomo Bank telah secara berkala menyampaikan laporan kepada OJK secara benar dan tepat waktu.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai : 1.20)

Rencana Bisnis BPR (*business plan*) disusun secara realistis melalui Proses Kebijakan dan Prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan termasuk melibatkan unsur Pejabat Eksekutif Utomo Bank sesuai dengan Visi dan Misi Utomo Bank, serta melakukan kebijakan dan strategi dengan memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dalam pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana bisnis dapat dilakukan secara konsisten dan tetap tujuan pada pencapaian keberhasilan Rencana Bisnis Bank. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank tetap dilakukan oleh Utomo Bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan teknis dan pelaksanaan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai : 2.25)

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) Anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan secara Transparan kepada publik melalui sarana media surat kabar maupun sarana media lain yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan menjalankan Transparansi Informasi Produk dan Jasa Bank dengan menerapkan Pengelolaan Pengaduan Nasabah secara Efektif. BPR melaksanakan Transparansi informasi mengenai Produk, Layanan dan/ atau Penggunaan Data Nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan Analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata kelola, disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel Tahun 2023 pada masing- masing faktor penilaian diperoleh nilai komposit sebesar 1.82 dengan peringkat komposit adalah **“Baik”**, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Struktur Tata Kelola pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan GCG telah dilengkapi sejak tahun 2017 . Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan baik hingga Tahun 2023. Sedangkan dari sisi infrastruktur masih perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman dalam bekerja.
2. Aspek Proses Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan GCG cukup efektif karena telah didukung oleh struktur dan infrastruktur yang cukup lengkap. Utomo bank berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan pada proses manajemen risiko dari periode ke periode agar dapat memberikan hasil yang maksimal bagi penerapan tata kelola BPR yang baik.
3. Aspek Hasil Tata Kelola pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan GCG yang dihasilkan dari Aspek Proses Tata Kelola telah cukup bahwa Utomo bank dapat beroperasi dengan baik dan mencapai kinerja dengan baik. Kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas.

Baturaja, 29 Januari 2024

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel


Lunto Hasan
 Komisaris Utama




Ferrial Aksha
 Direktur Utama